

# Kesultanan Nusantara dan Faham Keagamaan Moderat di Indonesia

Choirul Fuad Yusuf

*Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan  
Badan Litabang dan Diklat Kementerian Agama  
cfy\_depag@yahoo.com*

## **Abstract**

*The Sultanates (Islamic kingdoms), have played a pivotal role in the spread of Islamic teachings throughout the Nusantara archipelago - the archipelago that was later to be known as Indonesia. This article tries to trace and explain the most significant contribution of the Sultanates in spreading Islamic teaching around the archipelago. With the use of documentary method, the article highlights some conclusions. First, the Sultantes played an important role in the process of Islamization in the Nusantare archipelago. Through their political authority or influences, most of Sultans involved proactively in the process of spreading Islam in Indonesia—at least by implementing policies for Islamic development. Second, doctrinarily, most of Nusantara (Indonesia) Sultanates developed a moderate Islam which was significantly able to be witnessed up to the present time. Any cultural capitals of the pre-Islamic society and the powerful authority of Sultanates in one side, and the characters of Islam itself as a universal religion in another side, a moderate Islamic teachings has significantly developed with its great influnces in a wider aspect of life in Indonesia today.*

**Key words:** *sultanate, spread of Islam, radical Islam, moderate teachings, future Islam.*

### Abstrak

Kesultanan memegang peranan sangat penting dan strategis dalam penyebaran Islam di Nusantara (Indonesia), terutama pada awal perkembangannya. Artikel ini mencoba untuk menelusuri, apa dan sejauhmana peranan yang dilakukan kesultanan atau kerajaan Islam dalam proses penyebaran dan penguatan Islam di Nusantara. Dengan menggunakan pendekatan studi dokumen ini, tulisan ini menggaris-bawahi sejumlah kesimpulan. *Pertama*, Kesultanan Nusantara memegang peran penting dan strategis dalam penyebaran, pengembangan Islam proses Islamisasi di wilayah Nusantara (baca: Indonesia). Melalui pengaruh politis otoritarian, Sultan atau raja, membantu percepatan penyebaran dan pengembangan ajaran Islam Indonesia. *Kedua*, secara doktrinal, sebagian besar kesultanan Nusantara mengembangkan ajaran Islam moderat. Modal kultural masyarakat Indonesias pra-Islam, dan peranan Kesultanan yang otoritatif di satu pihak dan karakteristik ajaran islam moderat yang masuk ke Indonesia pada saat itu di pihak lain, Islam moderat mengalami perkembangan yang sangat cepat dan efektif sehingga pengaruhnya dapat dirasakan hingga dewasa ini pada berbagai aspek kehidupan.

**Kata Kunci:** Kesultanan, penyebaran Islam, Islam radikal, ajaran moderat, Islam Masa depan.

### Masuknya Islam Ke Nusantara

Ikhwal masuknya Islam ke Nusantara (baca: Indonesia) masih menjadi perdebatan para sejarawan dan ilmuwan sosial lainnya hingga kini. Perdebatan yang mengemuka berkisar pada persoalan “dimana” dan “kapan” sesungguhnya Islam masuk ke wilayah Nusantara. Perbedaan perspektif, bukti sejarah, dan persepsi dan pemahaman terhadap “Islam” sebagai agama yang berbeda cenderung merupakan faktor pemicu perdebatan yang tak kunjung berakhir. Entoh demikian, sekedar bahan pijakan (*standing point*) narasi selanjutnya, paling tidak, bisa diajukan tiga pandangan “klasik” tentang kehadiran Islam. *Pertama*, pandangan yang meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad 7 Masehi.<sup>1</sup> Pandangan ini didukung oleh sejumlah

---

<sup>1</sup> Pendukung teori ini diantaranya adalah C.J Van Leur, dalam *Indonesian Trade of and Society*. Hague: W. Van Hoeve, 1955) ; Hamka,

kefaktaan sejarah, antara lain: (i) pandangan yang diacukan pada *historical narratives* yang menyebut bahwa tahun 675 Masehi terdapat perkampungan Arab Islam orang Arab di pantai Barat Sumatera yang mempraktekan ajaran Islam. Diduga, sejak abad 7 ini telah terjalin hubungan perdagangan kerajaan di wilayah Nusantara dengan dunia Arab, dan diasumsikan orang Arab sudah tinggal di Kanton sejak abad 4 yang kemudian berkembang ke Asia Tenggara; (ii) pandangan berdasarkan teori Mekkah yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad 7 berasal dari Arab (Mesir)—yang dibuktikan berdasarkan analisis pada tahun 647 di Pantai Barat Sumatera sudah berkembang Islam Arab (Mesir) dan Kerajaan Samudra Pasai menganut ajaran Islam mazhab Syafii yang saat itu dipeluk mayoritas penduduk Mesir dan Mekkah; dan (iii) penjelasan yang dirujuk pada fakta ditemukannya sejumlah pedagang muslim singgah di kerajaan Sriwijaya pada abad 7. Argumen-argumen ini meyakini Islam sudah hadir di wilayah Nusantara pada sekitar abad 7 Masehi.

*Kedua*, pandangan yang meyakini Islam masuk ke Indonesia (Nusantara) pada abad 13. Pandangan ini didasarkan pada beberapa teori. Pertama, teori Gujarat<sup>2</sup> yang menjelaskan Islam

---

Abdullah bin Nuh, D.Shahab, dan T.W. Arnold. Lihat: T.W. Snold, *The Preaching of Islam: A History of Propagation of the Muslim Faith*,

<sup>2</sup> Pencetus teori Gujarat adalah J.Pijnapel, W.F.Sutterhelm, dan Sucipto Wirjosuparto, yang didukung diantaranya adalah Snouck Hurgroje, W.F. Stutterhelm, Bernard H.M. Vlekke. Menurut Stutterhelm dalam *De Islam en Zijn Komst in th Archipel* bahwa Islam berasal dari Gujarat dengan dasar batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudera Pasai, al-Malik al-Saleh yang wafat pada 1297. Stutterhelm berpendapat relief nisan tersebut bersifat Hinduistik yang mempunyai kesamaan dengan nisan yang terdapat di Gujarat (Badri Yatim, *Sejarah Islam di Indonesia*. Jakarta : Departemen Agama RI, 1998: 23). Penjelasan serupa juga dapat dilihat dalam *L'Arabie et Les Neerlandaises*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa peranan orang Gujarat dalam membuka hubungan dagang dengan Indonesia sebelum pedagang Arab—walau teori ini dibantah oleh sejumlah sejarawan, seperti Azsyumardi Azra. Menurut teori Gujarat, Sucipto Wirjosuparto meyakini bahwa: (i) corak batu nisan Sultan Malik al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak nisan di Gujarat, (ii) Hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin melalui jalur Indonesia-Cambay-Timur Tengah-Eropa. Lihat: Surnai Ulfa, “Teori Gujarat—Teori Kedatangan Islam di

masuk dan berkembang di Indonesia sejak abad 13, dibawa para pedagang dari Gujarat, India. Pada abad ini telah berkembang jalur perdagangan melalui Indonesia-Gujarat-Timur Tengah dan Eropa. Marcopolo menyebutkan bahwa 1292 di Perlak terdapat penduduk beragama Islam yang sebagian adalah orang Gujarat. Kedua, teori Persia<sup>3</sup> yang menjelaskan bahwa pembawa agama Islam ke Indonesia adalah orang Persia pada sekitar abad 13. Kesamaan budaya Persia dengan tradisi keagamaan masyarakat Indonesia, seperti peringatan 10 Muharam atau Asy-Syura dengan tradisi upacara “*tabulik*” atau “*tabut*” di Sumatera Barat, kesamaan ajaran sufi Syekh Siti Jenar dengan ajaran sufi Iran (al Halaj), perkembangan leren di Gresik yang mirip dengan apa yang berkembang di Iran, adalah sejumlah contoh fakta sejarah yang membuktikan kehadiran Islam berasal dari Persia (Iran) pada abad 13.

Perkembangan Islam dari dua daerah (di Sumatera) ini, kemudian Islam menyebar cepat ke berbagai penjuru Nusantara membawa ajaran Islam yang terembeskan kedalam berbagai aspek kehidupan—politik, ekonomi (perdagangan), pendidikan, dakwah, dan aspek keagamaan itu sendiri (kayakinan, ritual, pengetahuan, relasi, dsb.). Studi-studi sejarah masuknya Islam dan cara penyebarannya di Nusantara menyebutkan sejumlah cara yang dilakukan (biasanya) secara integratif, seperti : (a) perdagangan,<sup>4</sup> (b) pernikahan/perkawinan,<sup>5</sup> (c) dakwah,<sup>6</sup> (d)

---

Indonesia”. Diakses pada 13 Desember 16, dari *Skul ID Materi Sekolah Pkn, Sejarah. Skul-id.blogspot.co.id/2015/03*.

<sup>3</sup> Didukung sejumlah ilmuwan seperti Umar Amir Husen dan P.A Hussein Jayadiningrat.

<sup>4</sup> Para pedagang yang beragama Islam yang berasal dari berbagai negara menetap di daerah hunian tertentu, dan menyebarkan ajaran Islam di lingkungan masyarakatnya, dengan cara mendirikan mushola, pondokan, mengajar mengaji, dsb.

<sup>5</sup> Pernikahan/perkawinan yang terjadi antara pedagang (muslim) dengan pribumi yang beragama lain, harus melalui proses pernikahan secara Islam, dimana pengantin harus masuk agama Islam terlebih dahulu. Pernikahan pedagang muslim dengan pribumi, di masa awal perkembangan Islam, menjadi tradisi yang pesat, dikarenakan pada masa itu, pemeluk ajaran Islam, yang sebagian besar pedagang, cenderung merupakan kelas sosial ekonomi lebih tinggi (lebih kaya dan lebih berkelas) dibanding pemeluk agama

pendidikan pesantren,<sup>7</sup> (e) pengajaran sufisme (tasawuf), (f) kesenian, dan (g) politik.<sup>8</sup>

---

pribumi. Tradisi pernikahan antara muslim dan pribumi, merupakan faktor signifikan dalam percepatan penyebaran Islam di Nusantara. Apalagi, pernikahan antara muslim dengan raja atau putri/putri bangsawan (pembesar), secara sosio-politik berdampak sangat signifikan dalam percepatan perkembangan Islam.

<sup>6</sup> Sejak awal kehadirannya, pedagang muslim dari berbagai negara, sudah memiliki motif dakwah juga, sehingga mereka dalam proses interaksi sosialnya, mempergunakan kesempatan untuk menyampaikan ajaran yang dianutnya kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan atau cara yang sesuai kebutuhan. Dakwah yang sufistik (mengajarkan sufisme, tasawuf) pada awal Islamisasi di Nusantara (baca: Nusantara), pada saat itu sangat efektif dan mampu mengadaptasi, mendisseminasi, dan mempercepat penyebaran Islam dalam masyarakat umumnya, dan dalam lingkungan kerajaan khususnya. Pendekatan sufistik dalam dakwah dinilai mampu mengakomodasi budaya (tata nilai, norma, tradisi, adat-istiadat, kearifan lokal) dan keyakinan lokal yang tumbuh sebelumnya. Daya adaptasi sufisme inilah yang melahirkan percepatan akulturasi antara Islam sebagai agama baru di satu pihak dengan Hindu, Buddha, dan *indigenous faiths* yang dianut dan berkembang jauh sebelumnya.

<sup>7</sup> Salah satu strategi dakwah atau penyebaran Islam yang ditempuh sejak awal kehadiran Islam di Nusantara, hingga kini, adalah mendirikan dan mengembangkan sistem pendidikan pesantren. Diawali, dengan membangun mushala, kemudian pondokan lahirilah lembaga pendidikan yang sistematis yang efektif untuk menyebarkan agama Islam dan mengembangkan umat dalam masyarakat. Dan, dalam sejarahnya, pesantren yang tumbuh subur sejak kehadiran Islam di Nusantara, merupakan lembaga yang sangat strategis dan efektif dalam penyebaran Islam itu sendiri, karena memiliki sejumlah ciri kelembagaan yang tertentu, seperti: (i) memiliki model pembelajaran/pengajaran yang lebih sistematis (=orientasi belajar yang lebih fokus, “kurikulum”/materi yang lebih baik dan terencana, metoda yang lebih bervariasi, termasuk boarding sistem (sistem diasramakan), kelas atau kelompok belajar yang lebih besar, dsb., dan \*(ii) mampu menghasilkan lulusan (tamatan) yang lebih berkualitas, seperti kyai, ustad, muaallim, yang kelak menjadi “pelaku” dalam penyebaran Islam, (iii)—sebagai lembaga pendidikan, pesantren terformalisasi sebagai lembaga yang berkembang dan memiliki otoritas, pengaruh, dan karisma sosial yang mampu memerankan sebagai agen perubahan masyarakat pada spektrum lebih luas—sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan itu sendiri.

<sup>8</sup> Dipadatkan dari Carolina, “Penjelasan Lengkap Proses Awal Masuknya Agama Islam di Indonesia”, posted pada 6 Desember 2015. Diakses dari <http://www.pelajaransekolahonline.com/2015/6>, pada 30 November 2016.

Kehadiran dan keberadaan Kesultanan Islam, secara sosio-historik, ternyata tidak hanya tumbuh, hadir, dan berperan hanya sebagai “*center of political power and authority*”, namun juga menjalankan sejumlah peran dalam berbagai dimensi kehidupan—politik, ekonomi, budaya, dan agama itu sendiri. Banyak diantara para sultan atau raja Islam menjadikan Islam sebagai agama negara dan dijadikan sebagai sumber penetapan hukum yang diberlakukan di wilayahnya. Sebagian menyusun atau membuat kebijakan, program-program yang secara langsung atau tak langsung memperkuat posisi Islam dan penyebaran Islam di wilayahnya, seperti pembangunan mesjid, pembinaan dan fasilitas para ahli agama, mubaligh, pendai untuk berdakwah di wilayahnya, bahkan seringkali mengirimnya ke wilayah kesultanan atau kerajaan lain yang membutuhkannya.



**Peta jalur penyebaran Islam di Indonesia**

*Sumber:* <http://www.sejarah-negara.com/kapan-islam-masuk-ke-indonesia/>

### **Kesultanan dan Islamisasi Nusantara**

Dalam perkembangannya, Islam yang pada awalnya dibawa para pedagang berbagai ras, seperti Arab, Persia, India, Cina, dan lainnya, kemudian pada masa berikutnya berkembang melalui berbagai saluran media seperti dakwah, pernikahan, pendidikan, ke-

senian, perdagangan, tasawuf, dan politik tentunya, sehingga Islam berkembang dengan cepat dan luas di Nusantara dan sekitarnya. Dinamika perkembangan Islam cenderung berlangsung secara integratif-sistemik, yang kerap terjadi secara berbarengan, tidak terjadi secara sendiri-sendiri. Biasanya, perkembangan akulturatif-integratif mewujud dalam bentuk perjumpaan antar berbagai unsur kehidupan—antara latar pola budaya, tradisi, nilai, norma yang lama dengan yang baru. Implikasinya, Islam cepat beradaptasi dan terserap secara cepat dan luas di berbagai tempat, dan sektor kehidupan masyarakat. Namun demikian, proses perkembangan Islam tersebut, sesungguhnya tak lepas dari kontribusi politis keberadaan kesultanan atau kerajaan Islam. Kehadiran kesultanan memegang peran penting, strategis bahkan menentukan percepatan perkembangan Islam itu sendiri di wilayahnya. Paling tidak, dari perspektif politik, terdapat sejumlah peran signifikan Kesultanan dalam proses Islamisasi di Nusantara. Fakta sejarah menjelaskan sejumlah Islamisasi melalui jalur politik Kesultanan.

*Pertama*, keberadaan dan perkembangan kesultanan (kerajaan Islam) di Nusantara, secara politik, menjadi penyebab langsung atau tidak langsung proses kehancuran atau keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu atau Buddha, yang pada gilirannya mempercepat perkembangan Islam di Nusantara. Melalui berbagai pendekatan—baik pendekatan militer maupun non-militer, kursif maupun provokatif, terjadi perluasan dan penguasaan terhadap kerajaan-kerajaan sebelumnya, yang secara doktrinal merupakan kerajaan Hindu atau Buddha. Ekspansi atau okupasi terhadap kerajaan-kerajaan tersebut, secara sosio-politik maupun sosio-kultural menjadi “*political & cultural capital*” yang memperlancar percepatan penyebaran Islam di Nusantara, dan menggantikan pengaruh ajaran kedua agama tersebut. Kerajaan terbesar Hindu, Majapahit yang berdiri pada 1292 dan mencapai zaman keemasannya pada sekitar tahun 1345-1389 pada masa raja Hayam Wuruk dengan patihnya Gajahmada dan sempat berkuasa atas seluruh kepulauan Asia Tenggara bahkan jazirah Melayu, misalnya, dapat diruntuhkan Demak—yang dalam perkembangannya kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di pulau Jawa. Jauh sebelumnya Kerajaan terbesar Buddha, Kerajaan

an Sriwijaya yang berdiri pada abad 7 dan mengalami keemasannya sehingga mampu melakukan kolonisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara lain Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina, pada ujung pemerintahannya juga mengalami keruntuhan, yang salah satu faktor penyebabnya adalah karena pengaruh kerajaan-kerajaan kecil Islam yang memisahkan diri dari Kerajaan Sriwijaya.

**Kedua**, pada masa pemerintahannya, sebagian besar kesultanan yang terdapat di wilayah Nusantara, pada umumnya membuat kebijakan diorientasikan pada penguatan penyebaran Islam di Nusantara melalui berbagai pendekatan. Dengan kata lain, penyebaran dakwah Islamiyah (Islamisasi) didukung dan diakselerasi oleh kekuatan politik. Tanpa dukungan kekuatan politik berupa kebijakan-kebijakan kesultanan dan program-program konkretnya, Islamisasi di Nusantara tidak akan berlangsung semulus dan sefektif seperti apa yang terjadi.

“Setelah muncul kerajaan-kerajaan Islam, para rajanya memiliki kepedulian dalam menyebarkan Islam. Hal ini sesuai dengan politik Islam, dimana raja bertugas untuk menyebarkan dan membela agama (Islam). Kerajaan Samudera Pasai, misalnya, memainkan perannya dalam perkembangan Islam di Jawa dan Sulawesi pada tahun 1396 M, yaitu pada masa Pemerintahan Sultan Zainal Abidin Bahian Syah (1349-1396), yang dilakukan dengan cara mengantarkan dua orang pendakwah ke Jawa, yaitu Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak. Contoh lain adalah Kerajaan Demak di Jawa, dimana para penguasa kerajaan ikutserta membatu penyebaran Islam di Palembang dan Banjarmasin, yang kemudian berhasil mempercepat Islamisasi di pesisir Barat Pulau Jawa.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Tiar Anwar Bakhtiar, M.Hum, “Masuk dan Perkembangan Islam di Indonesia”, 2013. Baca juga dalam Syed Muhammad Naguib Al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan*. Kualalumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Melalui kemampuan dan pengaruh politisnya inilah, kesultanan Islam di Indonesia yang sebagian besar didirikan atas dasar visi untuk Islamisasi, pada umumnya memosisikan diri sebagai pusat kekuasaan (*center of political authority*) untuk melakukan Islamisasi dengan cara memberlakukan kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk dukung perkembangan Islam. Dalam hal ini, misalnya, Kerajaan Aceh Darussalam menerapkan undang-undang beranama “*Kitab Adat Mahkota Alam*”. Dalam kitab ini, diantaranya Sultan Alaudin dan Iskandar Muda, memerintahkan kewajiban sholat lima waktu dan ibadah puasa secara ketat, dan memberikan hukuman bagi yang melanggar. Sultan Samudera Pasai III, Sultan Ahmad Bahian Syah Malik az Zahir, membuat kebijakan untuk memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam agar mereka tunduk dan membayar *jizyah* Selain itu pada masa itu, juga dikeluarkan kebijakan yang mengaramkan riba. Kesultanan Demak, seperti diakui oleh De Graff dan Th Pigeaud mengembangkan atau menerapkan sistem pengadilan Islam, yang dipimpin oleh *qodi*. Pada masa kerajaan Demak (1512-1552), karisma para Wali Songo (Wali Sembilan),<sup>10</sup> memosisikan kerajaan seba-

---

<sup>10</sup> Wali Songo (Wali Sembilan) yaitu (1) Sunan Maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia, eminggal tahun 1419 M, mendakwahkan Islam di Jawa Timur, (2) Sunan Ampel (Raden Rahmat), mendakwahkan Islam di Jawa Timur, (3) Sunan Bonang (Maulana Makdum Ibrahim, 1465-1525), Tinggal di Tuban, dakwah di Jawa Timur, (4) Sunan Giri (Raden Paku), tinggal di Gresik, dan dakwah di Jawa Timur, (5) Suna Drajat (Syarifuddin Hasyim), tinggal di Sedayu Jawa Timur, (6) Sunan Kalijaga (Raden Muhammad Syahid). Dikenal sebagai wali yang keliling Pulau Jawa untuk berdakwah, (7) Sunan Kudus (Ja’far Siddiq), tinggal di Kudus, dan berdakwah di pesisir Jawa Tengah, (8) Suna Muria (Raden Prawoto), tinggal di lereng Gunung Muria, dan berdakwah di sekitar gunung Muria, dan (9) Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah), tinggal di Cirebon, dan berdakwah di Jawa Barat. Tidak semua yang tergolong Wali Songo berasal dari luar (luar Indonesia). Malah sebagian besar dari wali songo menurut sejumlah sumber berasal dari Jawa sendiri, dan sebagian memiliki hubungan dengan kerajaan (Uka Tjandrasasmita Ed), *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984).hlm.197), dan Slamet Effendy Yusuf, *Dinamika Kaum Santri*. Jakarta: Rajawali, 1983, hlm.3) adalah Hampir kesemuanya memiliki hubungan dengan raja. Misalnya, Sunan Kalijaga adalah putra seorang Tumenggung Majapahit, Sunan Giri adalah putra hasil perkawinan antara seorang putri Kerajaan Blambangan

gai pusat penyebaran agama Islam. Dan menjadikannya sebagai kerajaan Islam yang menunjuk Raden Patah sebagai rajanya. Demikian pula, Kerajaan Mataram melakukan perubahan tata hukum di bawah pengaruh hukum Islam oleh Sultan Agung. Tindak kriminal dihukumi menurut *Kitab Kisas* yaitu kitab undang-undang hukum Islam pada masa Sultan Agung. Kerajaan Banten (yang didirikan Sunan Gunung Jati), sejak di bawah Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1680) menerapkan hukuman “rajam” bagi pencuri dengan cara memotong anggota badan sesuai dengan tingkat kesalahannya.<sup>11</sup>

Lebih jauh, kesultanan Nusantara dalam aspek politik ini, juga berhasil menjadi “*political instrument*” untuk melakukan pengintegrasian atau unifikasi sejumlah kekuatan untuk bersatu menjaga keutuhan dan persaudaraan sesama umat beragama yang berada pada wilayah kekuasaan kesultanan yang berbeda. Berdasarkan rekam sejarah, melalui inskripsi yang dimulai sejak abad 7 hingga hingga abad 13 dan abad 15-an, sejarah Indonesia ditandai oleh kondisi “*unity and coherence*” (kesatuan dan pertalian akrab) dalam upaya Islamisasi.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, seorang sarjana Amerika Galvan,<sup>13</sup> Profesor Program Studi Internasional dan Ilmu Politik, Galvan menyimpulkan hasil kajiannya bahwa: “Kesultanan sebagai *Neo-traditional customary institu-*

---

dengan seorang muslim; Sunan Gunung Jati adalah pRara Santang putri Prabu Siliwangi, kemudian Sunan rahmat adalah saudara sepupu permaisuri Brawijaya.

<sup>11</sup> Diringkas dari berbagai sumber, seperti: A Hasymi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Maarif, 1981; Hadi Arifin Malikusalleh Mutiara dan Pasai. Jakarta: PT Madani, 2005. Ahmad Mansur Suryangara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*; dan Uka Tjandrasasmita (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

<sup>12</sup> Dong Sull Choi, The Process of Islamization and Its Impact on Indonesia, dalam Cyril Glasse *The Concise Encyclopedia of Islam*. New York: Harper Collins Publishers, 1989.

<sup>13</sup> Denis Galvan, Gurubesar Ilmu Politik dan Studi Internasional Universitas Oregon, AS, dalam makalahnya “*Democracy Without Ethnic Conflict : Embedded Parties, Transcendental Social Capital & Non-Violent Pluralism in Senegal and Indonesia*”, disajikan pada *The 97<sup>th</sup> Annual Meeting of the American Political Science Association*, San Francisco CA, Sept 2001.

*tion* (Sultanate, misalnya), bisa menjadi “*effective means for unifying communities*”. Termasuk pula mereduksi atau meresolusi konflik”. Kesultanan, demikian pula, melalui pertalian pernikahan dapat menyatukan kekuatan bersama untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme di Nusantara. Tidak hanya pertalian antar keluarga kesultanan di wilayah Indonesia saja, namun terjadi pula pertalian antara kesultanan di negeri tetangga (seperti di Brunei, dan Malaysia) untuk bersama melawan Belanda. Kerajaan/Kesultanan Mempawaah, misalnya, ternyata memiliki pertalian darah dengan Bugis, Dayak, dan Melayu (*historical lineage*) yang kemudian bisa membentuk sebuah tatanan bersama dalam kehidupan mereka. Dalam aspek penguatan nasionalisme atau sikap anti kolonialisme, sejak awal kehadirannya hingga penguasaan oleh kolonialisme Belanda, Portugis, dan Spanyol yang berlangsung hingga 350 tahun, kesultanan berkontribusi signifikan dalam berbagai aspek kenegaraan dan kebangsaan. Pertama, kerajaan Islam atau kesultanan di Nusantara telah mampu membentuk “*nationalist movement*” dan “*anti-colonialism*” sehingga Islam yang berkembang bersama kekuatan politik kesultanan dianggap oleh Kolonial Belanda dan Portugis sebagai penyakit menular (*contagious disease*)“ oleh Belanda yang sangat membahayakan dan harus diberangus.<sup>14</sup> Terekam dalam sejarah Indonesia, bahwa sejak Belanda mendarat di daratan Nusantara, 1956 hingga kemerdekaan 1945, Kesultanan Nusantara (yang tumbuh di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku, dan wilayah lainnya) bersama dengan menguatnya ajaran Islam di berbagai belahan Nusantara, berhasil melakukan konsolidasi, penguatan kemampuan militer untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial. Dalam hal ini, Kesultanan Nusantara, berdasarkan kesamaan ajaran (visi, misi, dan komitmen kebangsaan) berhasil melakukan penyatuan persepsi perlunya perlawanan terhadap segenap bentuk penjajahan, dan pembagian kekuasaan untuk Islamisasi di Nusantara. Bersamaan hadirnya Belanda dan Potugis yang membawa misi Kristenisasi,

---

<sup>14</sup> Allen M. Sievers *The Mystical World of Indonesia: Culture and Economic Development in Conflict*. Baltimore: Maryland: John Hopkins University Press, 1974, hal. 33.

kesultanan Nusantara kian mengokohkan diri posisinya untuk melakukan pengusiran terhadap para Kolonial. Kedua, kesultanan Nusantara yang berjumlah ratusan berkontribusi besar dalam perumusan konsep kenegaraan Nusantara, yang kemudian dikembangkan menjadi model konsep Negara NKRI. Konsep “sistem pemerintahan Mataram Islam”, misalnya, paling tidak, menginisiasi model pemerintahan Indonesia modern terutama dalam pembagian wilayah, distribusi otoritas, dan struktur birokrasi, pengangkatan pejabat, struktur politik lainnya.<sup>15</sup> Kesultanan di Indonesia, berjumlah lebih dari 500-an berkontribusi besar dalam pemaparan dan penguatan sistem pemerintahan. Kesultanan, pada saat itu mulai mengembangkan dan menerapkan sistem pemerintahan tentang “*sovereignty, territory, and how people should do*”. Embrio politik, birokrasi mulai dikembangkan diterapkan dalam pemerintahan kesultanan umumnya.

Sejak pertumbuhannya, kesultanan juga mengembangkan kebijakan-kebijakan tentang bagaimana warga kesultanan seharusnya mengikuti aturan, tradisi, dan ketentuan Sultan. Jumlah yang besar kesultanan, ditambah pengalaman kehadiran kerajaan-kerajaan sebelumnya—yang Hindustik dan Budhistik—secara sosio-politik membentuk kesadaran untuk bersatu membangun sebuah Negara besar, NKRI. Diawali oleh penguasaan Majapahit menguasai wilayah yang membentang dari Sabang-Merauke hingga wilayah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, dan juga saat penguasaan Imperium Sriwijaya. Berdasarkan kesadaran kesamaan latar budaya, ras, dan “*political will*” yang relatif sama, kesultanan Nusantara, meringkai embrio politik untuk Negara Nusantara.

Dalam aspek, ekonomi, Kesultanan Nusantara berkontribusi besar pada pengembangan perekonomian (perdagangan, pertanian, dan sebagainya), misalnya dalam kebijakan (pernihan) jenis tanam, pemasaran, dan bentuk jaringan perdagangan, bagi ke-

---

<sup>15</sup> Misalnya, pada Era Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645), digagas pembagian wilayah kerajaan: (1) Wilayah Pusat, yang terbagi (i) Kutanegara, dan (ii) Negara Agung, dan (2) Wilayah Daerah atau Mancanegara. Juga, pengagasan struktur birokrasi yang meliputi (i) Pemerintahan dalam Istana (*Peprintahan lebet*), dan (ii) Pemerintahahn Luar Istana (*Peprintahan Jawi*).

masalahatan warganya. Contoh: muasal penanaman “padi” di Kerawang, yang kemudian memosisikan Kerawang sebagai lumbung padi, diawali titah Sultan Agung untuk tanam padi sebagai bekal untuk penyerangan terhadap Batavia yang dikuasai Belanda.

Dalam aspek dakwah dan pendidikan, sangatlah jelas bagaimana kontribusi Kesultanan/kerajaan Islam dalam pendidikan Islam dan Islamisasi pada spektrum luas. Perkembangan pesantren sejak abad awal pertumbuhan Islam di Nusantara, memperkuat penyebaran Islam sebagai ajaran secara sistemik dan komprehensif.<sup>16</sup> Tercatat, hampir di pusat-pusat kerajaan Islam (kesultanan) terdapat lembaga pendidikan yang serupa dengan pesantren walau menggunakan nama yang berbeda. Misalnya, “*meunasah*,” *dayah* di Aceh, “*surau*” di Minangkabau, dan “*pesantren*” di pula Jawa—namun ketiganya memiliki sistem belajar yang sama.<sup>17</sup> Kerajaan Islam, sejak awal perkembangannya sangat memperhatikan pendidikan Islam sebagai cara penyebaran agama Islam. Dayah Cot Kala (Zawiyah Cot Kala) sebagai pusat pendidikan Islam didirikan oleh Kerajaan Peureulak (tahun 840 Masehi).<sup>18</sup> Sementara, Kerajaan Samudera Pasai pada masa pemerintahannya mengembangkan *halaqah* atau *zawiyah* yang

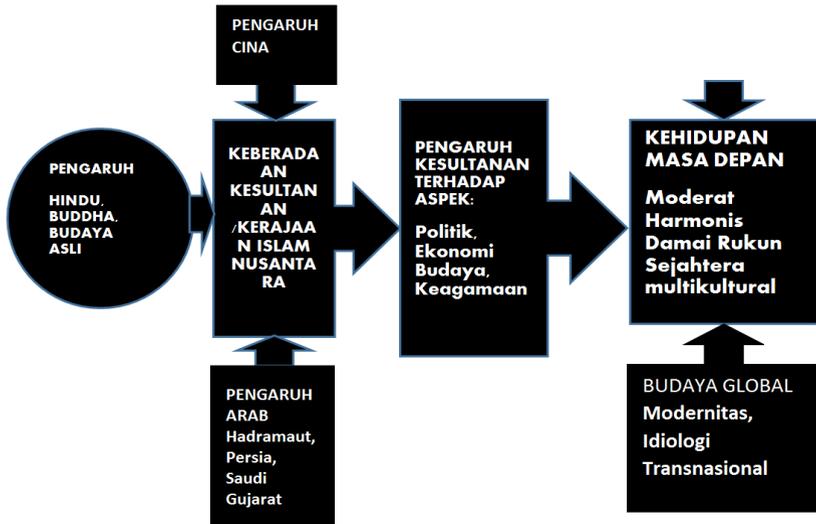
---

<sup>16</sup> Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua, telah berkembang sejak abad 11-an. Misalnya, Pesantren Jan Janpes di Madura berdiri pada tahun 1062 (Data Departemen Agama, 1984-1985). Baca : Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1966, hal.99. Namun faktanya pesantren banyak yang berdiri lebih tua lagi, didirikan setelah masuk Islam (Mastuhu)

<sup>17</sup> Banyak penulis sejarah Pesantren, berpendapat bahwa pesantren sebagai institusi pendidikan tertua merupakan adopsi dari luar, bukan institusi pendidikan Islam tipikal Indonesia. Diantaranya pesantren berasal dari India (Karl A Steenbrink), mungkin juga berasal dari Arab (Martin van Bruinessen). Namun, kesemuanya memiliki kesamaan karakteristik, yaitu : mengajarkan agama, diasramakan, guru tidak diberi gaji, tapi hanya penghormatan (ihtiram), kembangkan tradisi mengaji “kitab”, dan independen. Baca juga Djamaluddin & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, hal.99.

<sup>18</sup> Dayah Cot Kala, pada masa itu merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Badruzzaman Ismail dkk. (eds.) *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, hal.61-92.

diadakan di masjid kerajaan sebagai tempat pengajian agama Islam. Tradisi pengajian sejenis pesantren ini, dilanjutkan oleh kerajaan di Aceh selanjutnya. Pada masa pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam, terutama pada masa Sultan Iskandar Muda, banyak didirikan dayah-dayah di Aceh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga tercatat pada masa itu, Aceh tidak lagi mengenal buta huruf dan menjadi pusat pendidikan Islam.<sup>19</sup>



Dalam aspek kebudayaan, lebih lanjut kesultanan umumnya berkontribusi besar dalam upaya: (i) pengembangan (ii) pelestarian dan (iii) promosi budaya keagamaan (termasuk tradisi ritual-peribadatan seni dalam berbagai “*genre*”-nya sehingga kini

<sup>19</sup> Pengakuan Augustin de Beaulieu (seorang Laksamana Perancis) yang pernah berkunjung ke Aceh pada tahun 1620. Catatan perjalanan Beaulieu ini kemudian dijadikan sumber utama buku *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* atau *Le Sultanat d’Atjeh au tempt d’Iskandar Muda (1607-1636)* Denys Lombard, terjemah Winarsih Arifin, (Jakarta: Gramedia, 2008), yang menyimpulkan bahwa “...Aceh pada masa itu merupakan negara dengan sistem perkotaan bukan pertanian yang berwibawa di mata orang asing. Aceh merupakan pusat perdagangan dan kebudayaan yang mengembangkan kesusasteraan dan menjadikannya sebagai pusat pendidikan agama (*zawiyah*). Lihat: Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hal.192.

masih bisa disaksikan tinggalannya. Dengan demikian, kesultanan Nusantara, dalam sejarahnya telah menjalankan perannya sebagai “*center for cultural development and preservation*”. Bisa dibayangkan, jikalau kesultanan tidak menjalankan fungsi kultural ini, maka bukan mustahil “tinggalan budaya Nusantara” mengalami kepunahan yang luar biasa di negeri tercinta ini.

### **Islam dan Warisan Budaya Nusantara**

Islam merupakan agama universal dan agama *rahmatan lil ‘alamin*. Sebagai agama universal, secara doktriner, merupakan agama yang memiliki daya resistensi dan adaptabilitas tinggi yang mampu menyesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu (*shaliihu fi kulli zaman wal makaan*). Islam memiliki daya ajar dan daya atur yang disesuaikan dengan perkembangan kultural dan kondisi masyarakatnya, dan lokalitas sosial. Walau, tak dipungkiri, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dalam berbagai aspeknya, dalam perkembangannya juga muncul berbagai faham pemikiran ke-Islam-an—baik Islam “garis keras” maupun “Islam liberal”.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Perkembangan berbagai pemikiran yang tumbuh di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor kontak dengan organisasi Islam internasional atau faham keagamaan universal, dan faktor kesadaran transformatif, seperti perkembangan pemikiran Islam garis keras dan Islam liberal. Pemikiran garis keras kategori ekstrem yang kerap diistilahi dengan “Ekstemisme Islam”, diantara ditandai oleh karakteristik doktrinal, seperti: (i) pembolehan penggunaan taktik kekerasan (*vilent tactics*) atau jihadisme, (ii) pengusungan negara Islam (*Islamic state, khilafah*), atau pan-Islamic State, (iii) penerapan hukum Islam (*shariah*), (iv) pembentukan konsep komunitas muslim global (internasional), (v) penggunaan konsep Islam konservatif ekstrem. (Lihat: Zeyno Baran, dalam “*The Roots of Violent Islamist Extremism and Efforts to Counter it*”, diakses pada 13 Desember 2016). Sedangkan, Islam Liberal (*liberal Islam*) adalah gerakan liberal yang tumbuh dalam Islam. Islam liberal merupakan gerakan reinterpretasi dan pembaharuan dalam pemahaman dan praktek ajaran Islam, yang dipengaruhi oleh pemikiran filsafat liberal. Islam liberal mengembangkan prinsip dasar (*basic tenet*) ajaran Islam, diantaranya adalah: (i) memberi otoritas otonom bagi individu untuk menafsirkan al Qur’an dan Hadis; (ii) memberi peluang berfikir kritis (bahkan bebas) untuk pengujian, pemahaman, penafsiran teks-teks agama (keagamaan); (iii) memberi peluang kepada setiap individu untuk menggunakan *ijtihad* dalam pemahaman dan praktek keagamaan, (iv)

Budaya dalam kehidupan keseharian memegang peranan penting. Kebudayaan menyodorkan orientasi, *world-view*, *mode of conduct*, *way of perception* ikhwil realitas hidup keseharian masyarakat. Dengan nilai budaya (*cultural values and norms*) masyarakat bisa membentuk format, struktur, dan proses bermasyarakat pada skala lokal, nasional, maupun global.

Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan merupakan produk akulturatif dari berbagai sub-kultur (Hindu, Buddha, agama pribumi dan ratusan budaya suku), melahirkan budaya tipikal yang positif, konstruktif terbangunan tata hubungan yang kondusif. Dalam studi-studi etnologis, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, sejak awal perkembangannya memiliki sikap atau karakter positif, seperti: cenderung berkelompok (suka bergaul), menghargai senioritas (orang tua, sesepuh), menyukai kondisi dan situasi yang stabil, tidak suka pada situasi/kondisi yang yang tidak jelas dan tidak pasti, cenderung berorientasi pada masa lalu dan kini (kurang berorientasi pada masa depan),<sup>21</sup> *tepa selira* (Sarjono, 1995, Hardjowirogo), menghargai dan menjunjung tinggi nilai kerukunan atau kedamaian<sup>22</sup>, memelihara hubungan yang sehat dan menghargai orang lain tapi memiliki loyalitas tinggi kepada orang berstatus lebih tinggi (*loyaly to hierarchical structure*, or bapakisme (George W. Whitfield, “*The Indonesian Big Five: Conflict and Nature*”, <http://www.expat.or.id>. diakses pada 13 Desember 2016.

---

meyakini agama sebagai hak pribadi (personal rights). Manifesto Jaringan Islam Liberal Indonesia, adalah: (i) membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam, (ii) mengutamakan semangat religio-etik, bukan makna literal teks, (iii) mempercayai kebenaran relatif, (iv) memihak pada minoritas dan tertindas, (v) meyakini kebebasan beragama, (vi) memisahkan otoritas duniawi dan ukhrowi, otoritas keagamaan dan otoritas politik. Sumber: Hasil SWOT JIL, Jakarta 2003.

<sup>21</sup> Wustari L.H. Mangunwijaya, Faculty of Psychology, University of Indonesia, “Is there Cultural Change in the National Cultures of Indonesia”, [iaccp.or](http://iaccp.or). diakses pada 13 Desember 2016.

<sup>22</sup> Wustari L.H. Mangundjaya, “*The Role of Work Related Values to Organization Commitment*”: Proceedings of The 5th International Asian Association of Indigenous and Cross Cultural Psychology. Department of Psychology, Sebelas Maret University, Indonesia, January 10-11-2014.

Nilai ajaran Islam yang masuk ke Indonesia yang “moderat” yang dikembangkan oleh hampir seluruh kerajaan Islam di Nusantara,<sup>23</sup> di satu pihak, dan karakter tipikal positif asli masyarakat Indonesia (Nusantara) di pihak lain, menjadi dua potensi yang sangat kuat berpengaruh pada kemudahan dan percepatan pembentukan masyarakat Indonesia yang moderat, yang menciptakan tata kehidupan yang damai, *wasathan*. Dalam konteks inilah, kesultanan sebagai “*Islamic teachings-based-authority*” memiliki pengaruh atau peran yang sangat signifikan dalam penerapan dan pengembangan sistem budaya yang religius dan bernuansa “*local wisdom*”. Fakta menunjukkan bahwa Islam yang berkembang pada masa kejayaan kesultanan cenderung mengembangkan Islam moderat. Penerimaan ajaran sufisme yang dibawa Orang Arab dan Gujarat pada awal perkembangan kesultanan—baik yang berkembang di Sumatera, Jawa, dan berbagai daerah lainnya di satu pihak, dan masih kuatnya pengaruh tradisi Hindu, Buddha, dan *indigeneous local faith* menstrukturir berkembangnya Islam moderat—Ajaran Islam “tengah” yang mengutamakan sikap “moderat” (*wasathan*) sebagai akibat akomodasi ajaran yang berkembang sebelumnya, termasuk budaya lokal (*local culture*).

Islam yang dikembangkan pada era kejayaan kesultanan di Nusantara, cenderung menolak ajaran “garis keras”, yang cenderung ekstrem, seperti yang dikembangkan oleh gerakan-gerakan radikal.<sup>24</sup> Islam yang dikembangkan pada era kejayaan

---

<sup>23</sup> Sebagai contoh, Kerajaan Samudra Pasai, misalnya merupakan kerajaan pertama yang menjadikan dasar negaranya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat: Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008: 195. Ajaran Islam moderat juga dikembangkan oleh walisongo, diantaranya Sunan Kalijaga adalah turunan bangsawan, yaitu Adipati Tuban Tumenggung Wiulatikta. Kalijaga menyebarkan Islam dengan menggunakan kesenian wayang kulit yang pada masa itu sangat digemari masyarakat Jawa.

<sup>24</sup> Gerakan Islam “ekstrem” adalah gerakan yang menerapkan ajaran Islam dengan perspektif “ekstrem”. Gerakan Islam ekstrem, biasanya cenderung menwujudkan ajaran Islam (keyakinan, world-view, sikap, tindakan, dan sentimen keagamaan yang berbeda dari kebanyakan atau arus tengah (mainstream). Gerakan ekstrem, karena itu kerap memosisikan pada posisi diametral dan berlawanan (opposite position) dengan kelompok mayoritas dan bahkan dengan Pemerintah. Kelompok ekstrem biasanya berlawanan dengan

kesultanan yang didakwahkan oleh para wali, terutama wali-songo, para Tuan Guru, dan sufi, cenderung mengembangkan prinsip ajaran : a) pola pikir moderat (*fikrah tawassuthiyah*), (b) pola pikir toleran (*fikrah tasamuhiyah*), (c) pola pikir reformatif (*fikrah ishlahiyah*), (d) pola pikir dinamis (*fikrah tathow-wuriyah*), (e) pola pikir metodologis (*fikrah manhajiyah*). Oleh karena itu, ajaran Islam moderat mengajarkan kerangka berpikir (*manhaj al-fikr*, ) dan kerangka tindakan (*manhaj al haraki*) yang menghargai perbedaan, menerima pembaharuan, menjaga keseimbangan struktur dan dinamika kehidupan, serta tentu saja menghargai perbedaan, maka pola pikir (cara persepsi, cara berpikir, cara pemahaman) moderat—dilihat dari ras, suku, agama, budaya, bahasa, dan interes warganya menjadi sebuah kebutuhan niscaya (*necessary demands*) atau “*prerequisite condition*” bagi pembangunan bangsa Indonesia. Sebaliknya, pola pikir radikal berbasis ekstremisme dalam berbagai motifnya seharusnya dihindari kehadirannya di bumi Indonesia.<sup>25</sup>

---

kelompok moderat dan menolak paham dan gerakan yang dipersepsi “tidak Islami” karena kelompok ini meng-klaim sebagai paling Islami, paling benar dan paling bermoral (Dahlia Mogahed, “The Battle for Hearts and Minds: Moderate versus Extremist Views in the Moslem World”, 2006, hal.33). Oleh karena itu, secara politik-ideologis, kelompok ekstrem keagamaan (religious extremism) kerap dikategorikan dengan sejumlah sebutan, diantaranya sebagai: (i) far-left & far-right wing political groups, (ii) reaksionisme, (iii) radikalisme, (iv) fanaticism, dan (v) “fundamentalisme”. [Peter T. Coleman & Andrea Bartoli, dalam *Addressing Extremism*. The International Center for Cooperation and Conflict Resolution (ICCCR): h vColombia University.

<sup>25</sup> Dalam berbagai literatur ilmu sosial (politik, sosiologi, sejarah, dll.) istilah radikal (berakar “radixus”=akar), radikalisme, diartikan secara pejorative yang memuat konotasi negative dan destruktif. Raimond Ibrahim dalam artikelnya, *Radical Vs Moderate Islam: A Muslim View* menggambarkan seorang/kelompok radikal adalah orang/kelompok yang menghendaki: (1) kehadirann sistem khilafah, (2) penegekan sayariah Islamiyah, (3) penolakan terhadap reformasi atau pembaharuan apa pun bentuknya, (4) pewujudan jihad fi sabilillah, dengan tafsiran “keras”, (5) penolakan terhadap “kebebasan berbicara” (freedom of expression), (6) penggunaan tindak kekerasan (violent acts), (g) oposisi terhadap demokrasi, (7) penyikapan terhadap ahlul kitab (Yahudi dan Kristiani) sebagai dzimmi, (8) penolakan terhadap gagasan kesetaraan (ekualitas) kelompok mayoritas-minoritas, (9) penolakan kesetaraan gender, (10) penolakan terhadap konsepsi kebebasan beragama (religious freedom), (11) pengagendaan untuk mewujudkan Islam

## Indonesia Masa Depan

Melihat nilai-nilai luhur yang diterapkan, dikembangkan dan dilestarikan pada era kejayaan Kesultanan sejak abad 7 hingga abad 19-an, maka terdapat sejumlah catatan berikut.

Pertama, perlu dilakukan upaya pelestarian (konservasi/ preservasi) terhadap tinggalan budaya (*cultural legacies*) kerajaan atau kesultanan yang pernah hidup, berkuasa, atau ada di wilayah Nusantara. Pelestarian ini, diantaranya bisa dilakukan dengan penulisan sejarah kesultanan, atau kerajaann secara memadai. Penulisan ini, lebih sempurna jikalau tidak hanya memotret peristiwa yang memokus pada “*the Kingdom narration*”, tapi juga diperlengkap dengan pemotretan sejarah dengan pendekatan sejarah sosial (*social history*). Dalam proses kerja ini, selain informasi, data atau bukti sejarah yang lengkap ikhwil raja atau sultan sebagai “aktor sejarah utama” berikut istananya, juga pengungkapan peran orang biasa (*ordinary people*) dalam penulisan juga diperlukan eksplisitasnya agar terwujud sebuah “*integrated and meaningful historiography*”. Dalam pewujudan upaya ini, Puslitbang Lektur dan Khazanah, Balitbang & Diklat Kementerian Agama, sudah melakukan penelitian dan penyusunan sejarah kesultanan Nusantara. Tak kurang dari 25 kesultanan sudah dirampungkan (diterbitkan) dan dipublikasikan dalam bentuk cetak dan *online* dalam bahasa Indonesia dan Inggris.<sup>26</sup> Kedua, produk historiografis tentang kesultanan ini, hendaknya dimanfaatkan bagi penguatan fungsi pendidikan dan peradaban dalam upaya: (i) penyadaran pada masyarakat Indonesia, terutama generasi kini dan masa depan agar memahami dan mengambil “ibrah” (*lesson learned*) dari apa yang terjadi di masa

---

sebagai “*reign supreme*”, Qur’an sebagai ganti konstitusi, klaim hanya dan Islam yang benar, (12) penolakan sebutan “*Islamic terrorism*” dan “*Islamic fascism*” serta penolakan perang atas terorisme (*war on terror*), (13) pendukung terhadap kelompok jihadi (*jihadi groups*), (14) penolakan terhadap sekularisme, dan (15) penolakan terhadap praktek klitodektomi (atau klitodektomi). (Raymond Ibrahim, Gatestone Institute, International Policy Council, 2016).

<sup>26</sup> Diantaranya adalah kesultanan: Perlak, Deli, Riau, Surakarta, Banggai, Hitu Ambon, Sumbawa, Sumenep, Kotawaringin, Mataram, Dharmasraya, Sukapura. Deli Srdang, dll.

lalu, dan apa yang telah diperankan oleh kesultanan/kerajaan di Nusantara. Upaya ini, secara psikopolitik, bisa menjadi “*political instrument*” bagi penguatan patriotisme, nasionalisme, atau sikap “*pride of own nation*” yang diperlukan dalam dinamika globalisasi ini. Dalam konteks politik, terutama dalam pembinaan warga Negara Indonesia, penguatan nasionalisme menjadi kebutuhan nasional yang musti dipenuhi dalam rangka penguatan daya resistensi terhadap kehadiran ideologi transnasional atau universal (*universal ideologies or doctrines*), dan (ii) menunjukkan pada dunia bahwa pertumbuhan dan perkembangan kesultanan di Nusantara sejak abad 7 hingga prakemerdekaan, secara sosio-kultural dan sosiopolitik menunjukkan tingkat keadaban bangsa Indonesia yang sejak awal sejarah sudah mengenal sistem pemerintahan, dan sistem-sistem lainnya yang luhur. Historical show-up ini diperlukan untuk menepis citra buruk dan memperkenalkan Indonesia yang sesungguhnya.

Ketiga, nilai-nilai luhur yang pernah dikembangkan pada era kesultanan atau pra-kemerdekaan, seperti tradisi seni budaya lokal, folklor, kearifan lokal (local wisdom) dan faham keagamaan dan budaya moderat hendaknya dilestarikan, dikembangkan, dipromosikan sebagai “kekayaan bangsa”, dalam rangka : (i) penguatan peradaban (*civilization and human dignity empowering*) dan (ii) “*counter culture*” sekaligus bagi kehadiran budaya global yang negatif dan destruktif—yang diacukan pada prinsip hedonisme, kesenangan (*amusement*), “*freedom of expression*”, dan sekularitas—yang berbahaya bagi generasi bangsa kini dan mendatang.

### Daftar Pustaka

Arnold, T.Walker., *The Preaching of Islam: A History of Propagation of the Muslim Faith*. New York: Charles Scribner's & Sons, 1913.

Bakhtiar, Tiar Anwar, “Masuk dan Perkembangan Islam di Indonesia”

- Baran, Zeyno, “The Roots of Violent Islamist Extremism and Efforts to Counter it”, diakses pada 13 Desember 2016).
- Carolina, “Penjelasan Lengkap Proses Awal Masuknya Agama Islam di Indonesia”, posted pada 6 Desember 2015. Diakses dari <http://www.pelajaransekolahonline.com/2015/6>, pada 30 November 2016.
- Choi, Dong Sull, The Process of Islamization and Its Impact on Indonesia, dalam Cyril Glasse *The Concise Encyclopedia of Islam*. New York: Harper Collins Publishers, 1989.
- Coleman, Peter T. & Andrea Bartoli, dalam *Addressing Extremism*. The International Center for Cooperation and Conflict Resolution (ICCCR): Columbia University.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Data Departemen Agama, 1984-1985*. Jakarta, 1986
- Djamaluddin & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1998.
- Galvan, Denis., “Democracy Without Ethnic Conflict : Embedded Parties, Transcendental Social Capital & Non-Violent Pluralism in Senegal and Indonesia”, disajikan pada *The 97<sup>th</sup> Annual Meeting of the American Political Science Association*, San Francisco CA, Sept 2001.
- Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999.
- Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ibrahim, Raimond., dalam artikelnya, *Radical Vs Moderate Islam: A Muslim View*. Gatestone Institute, International Policy Council, 2016).
- Badruzzaman Ismail dkk. (eds.) *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah
- Sievers, Allen M. *The Mystical World of Indonesia: Culture and Economic Development in Conflict*. Baltimore: Maryland: John Hopkins University Press, 1974
- Supriyadi, Dedi., *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008: 195.

- Leur, S.C. Van , *Indonesian Trade of and Society*. Hague: W. Van Hoeve, 1955)
- Lombard Denys., *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* atau *Le Sultanat d'Atjeh au tempt d'Iskandar Muda (1607-1636)*, terjemah Winarsih Arifin, (Jakarta: Gramedia, 2008).
- Mangunwijaya, Wustari, L.H., "Is there Cultural Change in the National Cultures of Indonesia", iaccp.or. diakses pada 13 Desember 2016.
- Tjandrasasmita, Uka. (Ed), *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984
- Wustari L.H. Mangundjaya, "The Role of Work Related Values to Organization Commitment": *Proceedings of The 5th International Asian Association of Indigenous and Cross Cultural Psychology*. Department of Psychology, Sebelas Maret University, Indonesia, January 10-11-2014.
- Mogahed, Dahlia., *The Battle for Hearts and Minds: Moderate versus Extremist Views in the Moslem World*", 2006.
- Ulfa, Surnai, "Teori Gujarat—Teori Kedatangan Islam di Indonesia". Diakses dari *Skul ID Materi Sekolah Pkn, Sejarah. Skul-id.blogspot.co.id/2015/03*.
- Yatim, Badri., *Sejarah Islam di Indonesia*. Jakarta : Depag, 1998.
- Yusuf, Slamet Effendy, dkk. *Dinamikia Kaum Santri*. Jakarta: Rajawali, 1983.